

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



OLEH:

FARNI AULIA SARI

NIM. 2010842026

Dibimbing Oleh:

Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc

Dr. Ria Ariany, M. Si

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

Farni Aulia Sari, BP 2010842026, Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang 2025, Dibimbing oleh Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.sc dan Dr. Ria Ariany, M.Si. Skripsi ini memuat 109 halaman dengan referensi 10 buku teori, 9 buku metode, 5 skripsi, 6 peraturan dan 3 website.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan implementasi dari kebijakan SPM Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilatar belakangi sebab capaian mutu layanan pada pendidikan dasar masih kurang dari 100%.

Pendekatan kualitatif diimplementasikan dalam studi ini dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif. Observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah sejumlah teknik yang diimplementasikan untuk mengumpulkan data. *Purposive sampling* adalah teknik yang dimanfaatkan untuk mengambil sampel. Di lain sisi, absah tidaknya data yang dikumpulkan peneliti akan diuji dengan memanfaatkan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang memuat empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan variabel teori implementasi Edwards III, Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya sudah sukses melaksanakan kebijakan SPM Pendidikan Dasar. Tetapi, sejumlah indikator belum berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, variabel komunikasi memperlihatkan bahwa meskipun para pelaksana sudah menerima informasi kebijakan, tetapi sasaran kebijakan, yakni unit satuan sekolah belum menerimanya secara luas. Kedua variabel sumber daya yang memperlihatkan bahwa dua dari empat sumber daya yang dibutuhkan, yakni informasi dan kewenangan sudah tersedia. Tetapi, anggaran masih memberikan batasan pada indikator sarana dan sumber daya manusia. Selain itu, pengangkatan birokrat pada variabel disposisi sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan tim. Di lain sisi sebab tidak ada pendanaan khusus, maka tidak ada insentif yang diberikan, sehingga tidak mempengaruhi keinginan pelaksana untuk lebih mendorong pelaksanaan kebijakan SPM Pendidikan. Variabel terakhir adalah struktur birokrasi, yang meliputi SOP dan fragmentasi pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar sudah maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, SPM Pendidikan Dasar, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Farni Aulia Sari, BP 2010842026, Policy Implementation of Minimum Service Standards for Basic Education at the Dharmasraya Regency Education Office. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang 2025, Supervised by Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.sc and Dr. Ria Ariany, M.Si. This thesis consists of 109 pages with references to 10 theory books, 9 method books, 5 theses, 6 regulations and 3 websites.

This study aims to determine how the implementation of the Basic Education SPM policy at the Dharmasraya District Education Office. This research is motivated by the fact that the achievement of quality services in basic education is still less than 100%.

This study employs a descriptive approach to implement the qualitative approach. Interviews, documentation, and observation are a few of the methods used to gather information. Samples are taken using a process called purposeful sampling. However, source triangulation will be used to assess the validity of the data that the researcher has gathered. This study makes use of George C. Edward III's theory, which comprises four variables: bureaucratic structure, communication, resources, and disposition.

Based on the results of the study reviewed with the Edwards III implementation theory variable, the Dharmasraya Regency Education Office has successfully implemented the Basic Education SPM policy. However, a number of indicators have not run as they should. First, the communication variable shows that although the implementers have received policy information, the policy targets, namely school units, have not received it widely. Second, the resource variable shows that two of the four resources needed, namely information and authority, are available. However, the budget still provides limitations on the indicators of facilities and human resources. In addition, the appointment of bureaucrats in the disposition variable is in accordance with the competencies needed by the team. On the other hand, because there is no special funding, there are no incentives given, so it does not affect the desire of implementers to further encourage the implementation of the Basic Education SPM policy. The last variable is the bureaucratic structure, which includes SOPs and fragmentation of the implementation of the Basic Education SPM which is already maximal.

Keywords: Implementation, minimum education service standar (SPM), Primary Schools